



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 PADANG HARAPAN
GADING CEMPAKA, KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU, INDONESIA-38225
TELP. (0736) 38225

 <https://www.pt-bengkulu.go.id/>
 Pengadilantinggibengkulu
 Pengadilan Tinggi Bengkulu
 085381759786

ZONA
INTEGRITAS



MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi pada Tahun Anggaran 2023. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu 2023 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja dan juga analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2023.

Harapan kami LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat atas tanggung jawab yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, dan juga sebagai pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu di masa yang akan datang.

Bengkulu, 23 Februari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



Dr. HUMONTAL PANE, S.H., M.H.

**ZONA
INTEGRITAS**



MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Ringkasan Eksekutif

Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Bengkulu ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 8 (delapan) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu :

1. Sasaran mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Sasaran meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar **100,81%**.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam grafik dan tabel disamping :

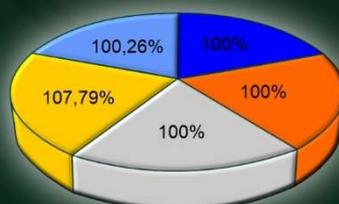
Tabel 1.
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	30,18%	28%	107,79%
Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan	96,25%	96%	100,26%
Rata-rata Capaian Kinerja			101,61%

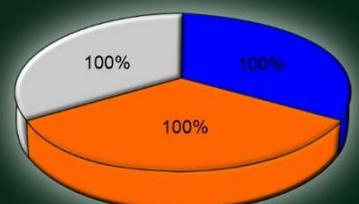
Tabel 2.
Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja			100%

Grafik 1.
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



Graifk 2.
Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	→	i
KATA PENGANTAR	→	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	→	iii
DAFTAR ISI	→	iv
DAFTAR TABEL	→	v
DAFTAR GRAFIK	→	vi
DAFTAR GAMBAR	→	vii
BAB I PENDAHULUAN		1
Latar Belakang	→	2
Tugas Pokok dan Fungsi	→	4
Struktur Organisasi	→	5
Isu Strategis	→	8
Sistem Penyajian	→	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA		11
Rencana Strategis 2020-2024	→	12
Rencana Kinerja Tahun 2022	→	15
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	→	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		18
Capaian Kinerja Organisasi	→	19
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	→	20
Realisasi Anggaran	→	46
BAB IV PENUTUP		51
Kesimpulan	→	52
Rekomendasi	→	53
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis 1	iii
Tabel 2 Sasaran Strategis 2	iii
Tabel 3 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	2
Tabel 4 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 5 Rencana Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 7 Pengukuran Capaian Kinerja	20
Tabel 8 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	21
Tabel 12 Persentase Perkara Perdata Yang diselesaikan Tepat Waktu	22
Tabel 13 Persentase Perkara Pidana Yang diselesaikan Tepat Waktu	25
Tabel 14 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang diselesaikan Tepat Waktu	27
Tabel 15 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	29
Tabel 16 Index Persepsi Kepuasan Stakeholder	30
Tabel 17 Pengukuran Indikator Index Persepsi Kepuasan Stakeholder Tahun 2023	32
Tabel 18 Rata-Rata Pengukuran Index Kepuasan Masyarakat per Unsur	33
Tabel 19 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	34
Tabel 20 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	36
Tabel 21 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	38
Tabel 22 Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	40
Tabel 23 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2023	43
Tabel 24 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023	43
Tabel 25 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023	44
Tabel 26 Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara Pidana	44
Tabel 27 Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara Pidana	44
Tabel 28 Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023	45
Tabel 29 Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2023	45
Tabel 30 Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2023 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja	46



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	iii
Grafik 2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	iii
Grafik 3. Pengukuran Capaian Kinerja	19
Grafik 4. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	20
Grafik 5. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	21
Grafik 6. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	24
Grafik 7. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan	27
Grafik 8. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30
Grafik 9. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	36
Grafik 10. Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	37
Grafik 11. Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	40
Grafik 12. Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	43
Grafik 13. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2023	47
Grafik 14. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu	6
Gambar 3. Rincian Biaya Perkaya di SIPP	49



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB I PENDAHULUAN

ZONA
INTEGRITAS



MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat dimulai dari berkualitasnya sistem perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya sistem evaluasi kinerja internal.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor tanggal tentang, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu atas penggunaan anggaran tahun 2023. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini telah membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Capaian Kinerja.

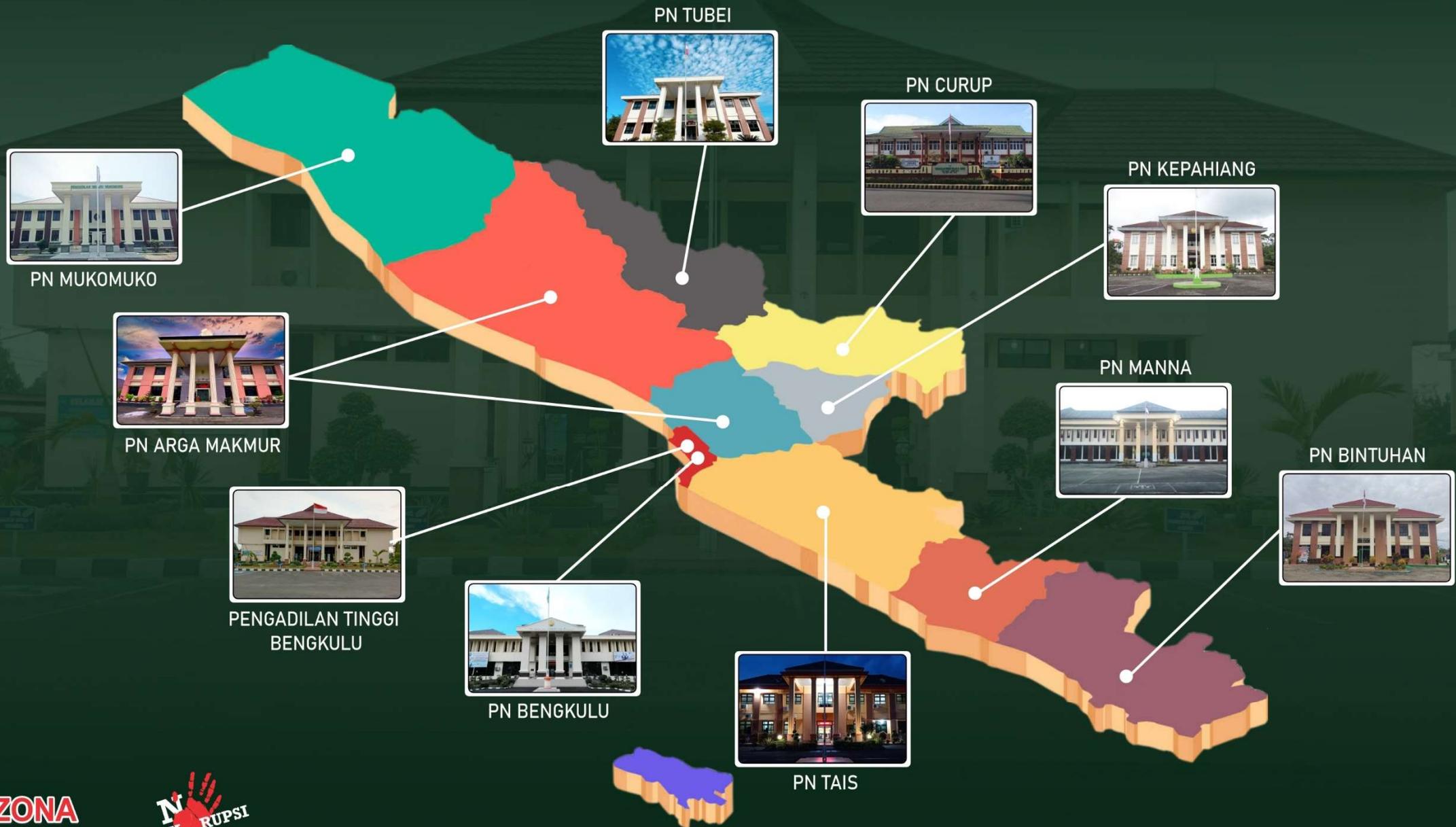
Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Propinsi Bengkulu yaitu :

Tabel 3. Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI	WILAYAH HUKUM	KELAS
1.	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kelas 1A
2.	PENGADILAN NEGERI CURUP	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	Kelas 1B
3.	PENGADILAN NEGERI MANNA	Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kelas II
4.	PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR	Argamakmur	Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Tengah	Kelas II
5.	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Bintuhan	Kabupaten Kaur	Kelas II
6.	PENGADILAN NEGERI TAIS	Tais	Kabupaten Seluma	Kelas II
7.	PENGADILAN NEGERI TUBEI	Tubei	Kabupaten Lebong	Kelas II
8.	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	Kepahiang	Kabupaten Kepahiang	Kelas II
9.	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	Mukomuko	Kabupaten Mukomuko	Kelas II



PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:



Fungsi Mengadili

Yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi.



Fungsi Pembinaan

Yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi, peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.



Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural dan Pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.



Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

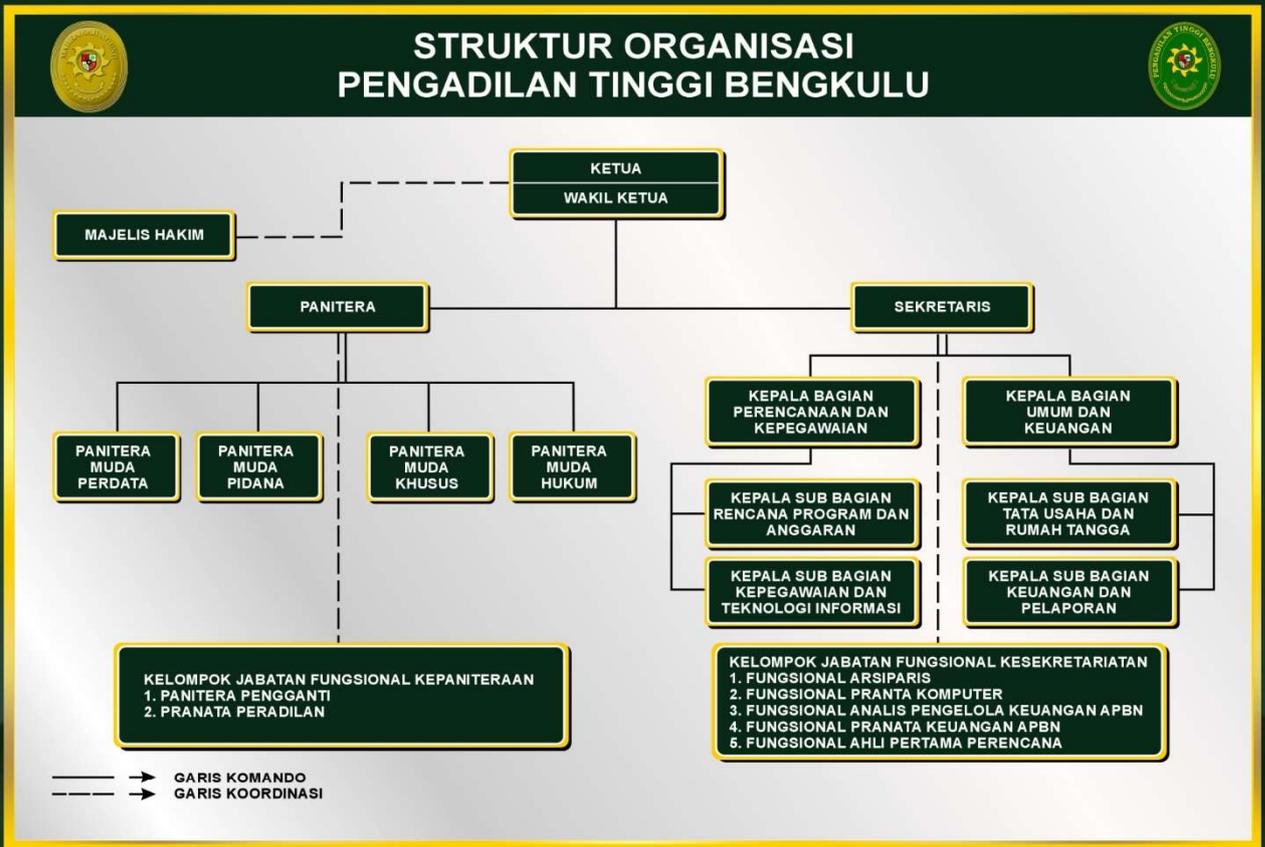


Fungsi Administrasi

Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, secara ringkas dituangkan pada bagan berikut :



KETUA PENGADILAN TINGGI

Ketua Pengadilan Tinggi sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi pada Pengadilan Tinggi.

WAKIL KETUA

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi membantu Ketua Pengadilan Tinggi melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama.

HAKIM TINGGI

Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi.

PANITERA

Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Terdiri atas:

1. **Panitera Muda Perdata**
Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata
2. **Panitera Muda Pidana**
Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
3. **Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor**
Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
4. **Panitera Muda Hukum**
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.

PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim Tinggi dalam persidangan perkara perdata, pidana dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

SEKRETARIS

Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi terdiri atas:

- A. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**
Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.
- B. Bagian Umum dan Keuangan**
Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Terdiri atas :

- 1. Subbag Rencana Program dan Anggaran**
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
- 2. Subbag Kepegawaian Teknologi Informasi**
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Terdiri atas :

- 1. Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga**
Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi tata usaha dan rumah tangga, keprotokolan, perpustakaan serta hubungan masyarakat.
- 2. Subbag Keuangan dan Pelaporan**
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Terdiri atas :

- 1. Pranata Komputer**
Mempunyai tugas menganalisis informasi, perancangan sistem informasi, perancangan sistem komputer, perancangan dan pengembangan database.
- 2. Arsiparis**
Mempunyai tugas melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan autentik dan naskah asli arsip terjaga.

KELOMPOK PELAKSANA

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan dari masing-masing subbagian pelaksana tersebut ditempatkan.

D. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sepanjang Tahun 2023 terkait dengan kemajuan atau pun perubahan di lembaga peradilan umum khususnya pada Pengadilan Tinggi Bengkulu antara lain :

KUNJUNGAN KERJA DAN PEMBINAAN OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima kunjungan kerja dari Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan disambut langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Bapak Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. beserta jajaran Pimpinan serta seluruh Hakim pada tanggal 07 Juni 2023



WISUDA DAN PURNA BAKTI KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Acara Wisuda dan Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum. oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Soebekti Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 31 Mei 2023.



PELATIHAN BERSAMA PENINGKATAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT INTERN PEMERINTAH

Pada tanggal 24 Juli 2023 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. menghadiri Pembukaan Acara Kegiatan Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dan Aparat Intern Pemerintah Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Provinsi Bengkulu



MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI SECARA VIRTUAL MEMPERINGATI HUT RI KE-78

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. menghadiri acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Secara Virtual Dalam Rangka Kemerdekaan RI ke-78 Tahun 2023 di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu pada tanggal 17 Agustus 2023.



PENANDATANGANAN MOU ANTARA PENGADILAN TINGGI BENGKULU DENGAN DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU

Penandatanganan kerjasama di bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas baik berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat pada tanggal 14 April 2023



MENGIKUTI KEGIATAN PERINGATAN HARI DONOR DARAH SEDUNIA

Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 14 Juli 2023 mewakili Pengadilan Tinggi Bengkulu menghadiri kegiatan Hari Donor Darah Sedunia di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis dan Sistematika Penyajian;

Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023;

Bab III Akuntabilitas Kinerja,

Pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisisnya dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV Penutup,

Pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah-langkah yang akan diambil di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Penghargaan yang diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2023



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

BAB II PERENCANAAN KINERJA

**ZONA
INTEGRITAS**



MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui perencanaan yang efektif, terarah dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Rencana Strategis 2020-2024 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.



1. VISI

Visi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU YANG AGUNG”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2020 sampai dengan 2024, sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu ;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
- Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut telah direviu untuk mempertajam Sasaran Strategis. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan
			b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan
			c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan
			e. Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan Peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan dengan Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM lebih dari atau sama dengan 80.
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Penyelesaian Perkara	ke pengadilan pengaju tepat waktu	
			b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus
			c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diputus

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut :

- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu.
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian Indikator Kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.
- Program Dukungan Manajemen
Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.
Program dan kegiatan ini untuk menunjang pelayanan peradilan.
- Program Dukungan Manajemen
Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.
Indikator Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana.
Program dan kegiatan ini untuk memenuhi layanan dukungan manajemen pengadilan sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja tahun 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau disebut juga dengan Perjanjian Kinerja.



Tabel 5 Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	1 layanan	Rp.21.054.738.000,-
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	28 %					
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan	96 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 layanan	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	142 perkara	Rp.174.500.000,-
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%					
		Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%					

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2023 merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan.



Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	28%
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan	96%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	21.054.738.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	417.037.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	174.500.000



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

ZONA
INTEGRITAS



MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2023 adalah sebesar **100,81 %**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 7 Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	30,18 %	28 %	107,79 %
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan	96,25 %	96 %	100,26 %
Rata-rata Capaian Sasaran					101,61 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Sasaran					100 %

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

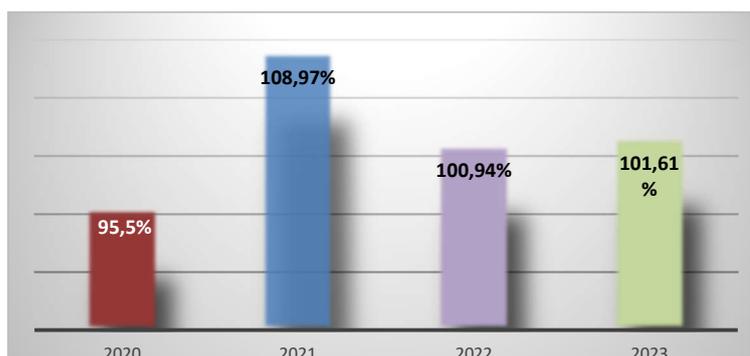
SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel 8 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	61,4%	156,86%	100,40%	107,79%
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	102,6%	114,94%	104,28%	100,26%
Capaian Sasaran	95,5%	108,97%	100,94%	101,61%

Grafik 1 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan upaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, ketepatan waktu penyelesaian perkara, penurunan sisa perkara, kepuasan terhadap hasil putusan serta kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Pada sasaran ini terdapat 5 indikator kinerja yang diukur.

Data pada tabel 4 dan grafik 1 menunjukkan bahwa capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2023 sebesar **101,61%**. Persentase capaian tahun 2023 ini meningkat bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2022 yaitu sebesar 100,94%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan capaian sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

SASARAN 1 INDIKATOR 1

PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara perdata pada tahun 2023 sebanyak 45 perkara, selama tahun 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 40 perkara dan perkara perdata yang diputus tepat waktu juga sebanyak 40 perkara. Dengan demikian tahun 2023 indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 12 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2023	PERDATA	40	40	100%	100%	100%
2022	PERDATA	35	35	100%	100%	100%
2021	PERDATA	46	46	100%	100%	100%
2020	PERDATA	30	30	100%	100%	100%

Grafik 5 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- [Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023](#)

Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2023 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

- [Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya](#)
Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024](#)
Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Standar Nasional](#)
Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2023 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 98,93%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2023 dengan selisih lebih sebesar 1,07%.
***Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 32 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)
- [Analisis Keberhasilan Kinerja 2023 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan](#)
Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Perdata telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
 - ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.21.561.775.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.539.684.073,- atau sebesar 99,90%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,10%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((21.561.775.000 \times 1,00) - (21.539.684.073))}{\sum_{i=1}^n (21.561.775.000 \times 1,00)} \times 100\%$$

$$E = 0,10\%$$

Keterangan :

PAKi : Pagu Anggaran

CKi : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran

SASARAN 1 INDIKATOR 2

PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara pidana pada tahun 2023 sebanyak 248 perkara, selama tahun 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 228 perkara dan perkara pidana yang diputus tepat waktu juga sebanyak 228 perkara. Dengan demikian tahun 2023 indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 13 Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2023	PIDANA	228	228	100%	100%	100%
2022	PIDANA	158	158	100%	100%	100%
2021	PIDANA	145	145	100%	100%	100%
2020	PIDANA	103	103	100%	100%	100%

Grafik 6 Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- [Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023](#)
Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2023 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

- [Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya](#)
Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024](#)
Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Standar Nasional](#)
Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2023 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 99,33%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2023 dengan selisih lebih sebesar 0,67%.
***Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 32 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)
- [Analisis Keberhasilan Kinerja 2023 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan](#)
Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
 - ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.21.621.975.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.599.240.833,- atau sebesar 99,89%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,11%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((21.621.975.000 \times 1,00) - (21.599.240.833))}{\sum_{i=1}^n (21.621.975.000 \times 1,00)} \times 100\%$$

$$E = 0,11\%$$

Keterangan :

PAKi : Pagu Anggaran

Cki : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran

SASARAN 1 INDIKATOR 3

PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian kinerja indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara pidana khusus pada tahun 2023 sebanyak 7 perkara, selama tahun 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 7 perkara dan perkara pidana khusus yang diputus tepat waktu juga sebanyak 7 perkara. Dengan demikian tahun 2023 indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 14 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2023	PIDANA KHUSUS	7	7	100%	100%	100%
2022	PIDANA KHUSUS	8	8	100%	100%	100%
2021	PIDANA KHUSUS	21	21	100%	100%	100%
2020	PIDANA KHUSUS	10	10	100%	100%	100%

Grafik 7 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- [Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023](#)

Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2023 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

- [Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya](#)
Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024](#)
Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Standar Nasional](#)
Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2023 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 99,11%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2023 dengan selisih lebih sebesar 0,89%.
***Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 32 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)
- [Analisis Keberhasilan Kinerja 2023 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan](#)
Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
 - ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.21.586.075.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.561.887.073,- atau sebesar 99,89%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,11%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((21.586.075.000 \times 1,00) - (21.561.887.073))}{\sum_{i=1}^n (21.586.075.000 \times 1,00)} \times 100\%$$

$$E = 0,11\%$$

Keterangan :

PAKi : Pagu Anggaran

Cki : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran

SASARAN 1 INDIKATOR 4

PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang diputus tahun berjalan. Semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum kasasi, maka diasumsikan semakin banyak para pencari keadilan yang puas dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Sesuai tabel di bawah ini, secara umum Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Tahun 2023 mencapai 107,79%.

Tabel 15 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI	JUMLAH PUTUSAN PERKARA BANDING	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2023	PIDANA	68	228	29,82 %	28%	106,50 %
	PERDATA	15	40	37,50 %	28%	133,92 %
	PIDANA KHUSUS	0	7	0,00 %	28%	0,00 %
	TOTAL	83	275	30,18 %	28%	107,79 %
2022	PIDANA	88	158	55,70 %	55%	101,27 %
	PERDATA	16	35	45,70 %	55%	83,09 %
	PIDANA KHUSUS	7	8	87,50 %	55%	159,09 %
	TOTAL	111	201	55,22 %	55%	100,40 %
2021	PIDANA	61	125	48,80 %	30%	162,60 %
	PERDATA	18	37	48,60 %	30%	162,00 %
	PIDANA KHUSUS	1	8	12,50 %	30%	41,60 %
	TOTAL	80	170	47,06 %	30%	156,86 %
2020	PIDANA	40	103	38,80 %	50%	77,60 %
	PERDATA	16	30	53,30 %	50%	106,60 %
	PIDANA KHUSUS	0	10	0,00 %	50%	0,00 %
	TOTAL	56	143	39,10 %	50%	78,20 %

Grafik 8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- [Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023](#)

Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar 28%. Realisasi pada indikator tersebut adalah sebesar 30,18%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

- [Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya](#)

- ✓ Jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi menurun sebesar 25,04%, target menurun sebesar 27% (sebelumnya 55% menjadi 28%) namun capaian kinerja meningkat sebesar 7,39%. Penurunan persentase target ini dianggap perlu setelah melalui monev capaian kinerja di tahun 2023, yang diperkirakan angka capaian kinerja hanya bisa mencapai maksimal 30% pada akhir tahun 2023. Oleh karena itu dianggap perlu untuk melakukan revisi target kinerja pada indikator ini. Namun selain hal tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu tetap mengupayakan pemberian pelayanan yang optimal untuk memaksimalkan kepuasan para pencari keadilan atas keputusan banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- ✓ Jika dibandingkan capaian kinerja selama tahun 2020-2022 maka dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian mengalami kenaikan dan penurunan, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator tersebut memiliki tren/kecenderungan yang meningkat.

- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024](#)

Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 55% pada Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 30,18%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun belum dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu. Hal ini disebabkan karena tingkat kepuasan para pencari keadilan atas putusan merupakan hal yang cukup subjektif, kepuasan bagi satu pihak belum pasti merupakan kepuasan bagi pihak lainnya.

- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Standar Nasional](#)

Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2023 adalah sebesar 30,18%, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 47,87%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu belum berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2023 dengan selisih sebesar 17,69%.

*Standar Nasional tersebut diperoleh dari data 32 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

- Analisis Keberhasilan Kinerja 2023 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah :

- ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menghasilkan putusan hukum yang berkualitas yaitu putusan yang memenuhi kriteria kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*purposiveness*);
- ✓ Monitoring dan Evaluasi yang rutin dilaksanakan dalam memantau capaian kinerja setiap triwulannya dalam mengantisipasi persentase capaian kinerja dan perubahan target kinerja maupun dalam upaya mengoptimalkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
- ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah 107,79% dengan target 28% dan realisasi 30,18%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.21.561.775.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.539.684.073,- atau sebesar 99,90%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,32%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((21.561.775.000 \times 1,07) - (21.539.684.073))}{\sum_{i=1}^n (21.561.775.000 \times 1,07)} \times 100\%$$

$$E = 7,32\%$$

Keterangan :

PAKi : Pagu Anggaran

Cki : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran

SASARAN 1 INDIKATOR 5

INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Penetapan indikator kinerja ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan hukum di lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel 16 Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Bengkulu

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2023	Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan peradilan	96,25	96	100,26%
2022	Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan peradilan	99,07	95	104,28%
2021	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100,00	87	114,9%
2020	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	87,17	85	102,5%



Survey Index Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap Triwulanan. Populasi survey ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan dari sejumlah 100 (seratus) orang responden dan berdasarkan hasil survey tersebut seluruh responden mayoritas memberikan penilaian puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Tabel 18 Rata-rata Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur

NO	RUANG LINGKUP	INDEKS RATA-RATA	KONVERSI	KUALITAS
1	Persyaratan	3,86	96,50	Sangat Baik
2	Prosedur	3,85	96,25	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,83	95,75	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,84	96,00	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,84	96,00	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,83	95,75	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,86	96,50	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,81	95,25	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,91	97,75	Sangat Baik
Rata-rata Hasil Survey		3,85	96,25	Sangat Baik

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- [Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023](#)
Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator kinerja Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar 96%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2023 juga 96,25%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- [Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya](#)
Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang juga berhasil mencapai target melebihi 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada para masyarakat pencari keadilan.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024](#)
Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 96% pada Indikator Kinerja Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 96,25%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

- Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2023 adalah sebesar 96,25%, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 97,14%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu belum melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2023 dengan selisih sebesar 0,89%.

*Standar Nasional tersebut diperoleh dari data 32 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

- Analisis Keberhasilan Kinerja 2023 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan :

- ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pencari hukum di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu
- ✓ Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat pencari hukum di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu

- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan adalah 100,26% dengan target 96% dan realisasi 96,25%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.21.471.775.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.449.824.073,- atau sebesar 99,9%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,36%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - (RAK_i))}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((21.471.775.000 \times 1,00) - (21.449.824.073))}{\sum_{i=1}^n (21.471.775.000 \times 1,00)} \times 100\%$$

$$E = 0,36\%$$

Keterangan :

PAKi : Pagu Anggaran

Cki : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran

SASARAN STRATEGIS 2.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Tabel 19 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Capaian Sasaran	100%	100%	100%	100%

Grafik 9 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kembali ke Pengadilan Pengaju.

Data pada tabel 19 dan grafik 9 menunjukkan bahwa capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2023 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan sasaran untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Bengkulu di tahun 2023 ini telah tercapai dengan sangat baik.

SASARAN 2 INDIKATOR 1

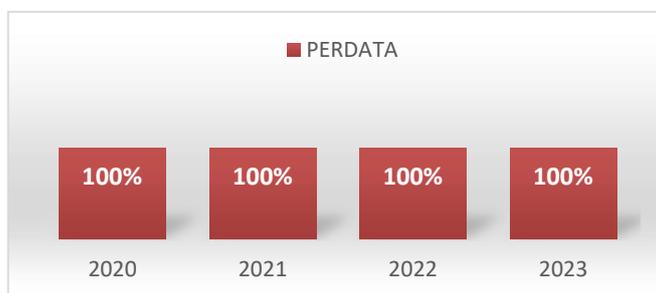
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERDATA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Tahun 2023 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 20 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2023	PERDATA	40	40	100%	100%	100%
2022	PERDATA	35	35	100%	100%	100%
2021	PERDATA	46	46	100%	100%	100%
2020	PERDATA	30	30	100%	100%	100%

Grafik 10 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2023 adalah sebanyak 40 perkara dan seluruh salinan putusan perkara perdata tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu langsung mengirim salinan putusan perkara perdata selalu tepat waktu.

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- [Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023](#)

Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2023 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

- [Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya](#)
Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara termasuk pelaksanaan pengiriman putusan perkara.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024](#)
Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Standar Nasional](#)
Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2023 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 98,35%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2023 dengan selisih lebih sebesar 1,65%.
***Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 32 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)
- [Analisis Keberhasilan Kinerja 2023 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan](#)
Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempedomani dan melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Perdata yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
 - ✓ Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.
- [Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya](#)
Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.21.561.775.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.539.684.073,- atau sebesar 99,90%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,10%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((21.561.775.000 \times 1,00) - (21.539.684.073))}{\sum_{i=1}^n (21.561.775.000 \times 1,00)} \times 100\%$$

$$E = 0,10\%$$

Keterangan :

PAKi : Pagu Anggaran

Cki : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran

SASARAN 2 INDIKATOR 2

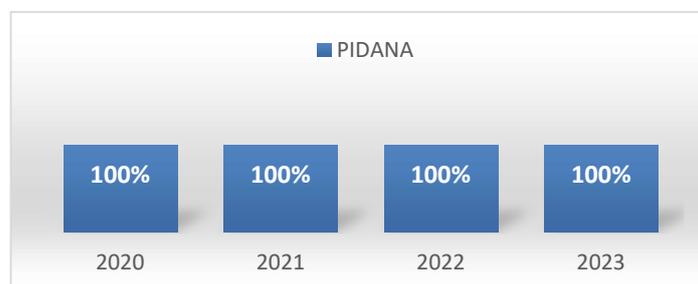
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PIDANA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus. Tahun 2023 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 21 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2023	PIDANA	228	228	100%	100%	100%
2022	PIDANA	158	158	100%	100%	100%
2021	PIDANA	145	145	100%	100%	100%
2020	PIDANA	103	103	100%	100%	100%

Grafik 11 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2023 adalah sebanyak 228 perkara dan seluruh salinan putusan perkara pidana tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu langsung mengirim salinan putusan perkara pidana selalu tepat waktu.

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- [Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023](#)
Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2023 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

- [Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya](#)
Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara termasuk pelaksanaan pengiriman putusan perkara.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024](#)
Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Standar Nasional](#)
Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2023 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 99,91%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2023 dengan selisih lebih sebesar 0,09%.
***Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 32 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)
- [Analisis Keberhasilan Kinerja 2023 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan](#)
Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempedomani dan melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Perdata yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
 - ✓ Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.
- [Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya](#)
Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.21.621.975.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.599.240.833,- atau sebesar 99,89%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,11%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((21.621.975.000 \times 1,00) - (21.599.240.833))}{\sum_{i=1}^n (21.621.975.000 \times 1,00)} \times 100\%$$

$$E = 0,11\%$$

Keterangan :

PAKi : Pagu Anggaran

Cki : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran

SASARAN 2 INDIKATOR 3

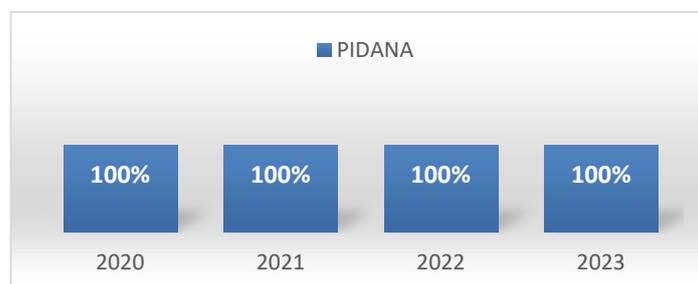
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PIDANA KHUSUS YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diputus. Tahun 2023 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 21 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2023	PIDSUS	7	7	100%	100%	100%
2022	PIDSUS	8	8	100%	100%	100%
2021	PIDSUS	21	21	100%	100%	100%
2020	PIDSUS	10	10	100%	100%	100%

Grafik 11 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Jumlah putusan perkara pidana khusus pada tahun 2023 adalah sebanyak 7 perkara dan seluruh salinan putusan perkara pidana khusus tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu langsung mengirim salinan putusan perkara pidana khusus selalu tepat waktu.

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- [Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023](#)

Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2023 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

- [Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya](#)
Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara termasuk pelaksanaan pengiriman putusan perkara.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024](#)
Pada dokumen Reviu Renstra 2020-2024, di tahun ini 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- [Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Standar Nasional](#)
Jika dibandingkan dengan **Standar Nasional***, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2023 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 99,05%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2023 dengan selisih lebih sebesar 0,95%.
***Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 32 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)
- [Analisis Keberhasilan Kinerja 2023 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan](#)
Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu :
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempedomani dan melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Perdata yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
 - ✓ Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.
- [Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya](#)
Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.21.586.075.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.561.887.073,- atau sebesar 99,89%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,11%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((21.586.075.000 \times 1,00) - (21.561.887.073))}{\sum_{i=1}^n (21.586.075.000 \times 1,00)} \times 100\%$$

$$E = 0,11\%$$

Keterangan :

PAKi : Pagu Anggaran

Cki : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran

B. REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran yang didapatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.21.646.275.000,- (*Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :



1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp.21.471.775.000,- (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.18.032.737.269,- (*Delapan Belas Miliar Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*)

b. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Jumlah Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.3.000.616.754,- (*Tiga Miliar Enam Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*)).

c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.416.470.050,- (*Empat Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah*).

Tabel 23 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2023

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	18.048.711.000	18.032.737.269	15.973.731	99,91%
Belanja Barang	3.006.027.000	3.000.616.754	5.410.246	99,82%
Belanja Modal	417.037.000	416.470.050	566.950	99,86%
TOTAL	21.471.775.000	21.449.824.073	21.950.927	99,90%

Grafik 13 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2023



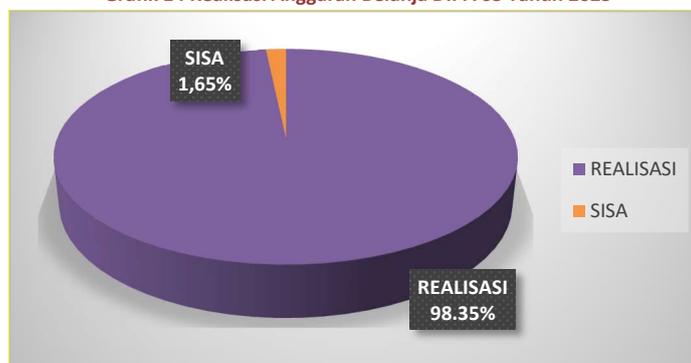
2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)

Tahun 2023 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum berupa Belanja Barang sejumlah Rp.174.500.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Lima Ratus Ribu Rupiah*). Belanja Barang pada DIPA 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Tabel 24 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Barang	174.500.000	171.619.760	2.880.240	98,35%
TOTAL	174.500.000	171.619.760	2.880.240	98,35%

Grafik 14 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023



REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sedangkan DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 25 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN %
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	21.054.738.000	21.033.354.023	21.383.977	99,90
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	417.037.000	416.470.050	566.950	99,86
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	174.500.000	171.619.760	2.880.240	98,35

Tabel 26 Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara Pidana

NO	URAIAN	VOLUME	REALISASI
1	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT BANDING	100	221
2	PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT BANDING	42	7

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 27 Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara Pidana

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	60.200.000	59.556.760	98,93	643.240
2.	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	24.300.000	22.203.000	91,37	2.097.000

INFORMASI KEUANGAN YANG DIBIYAI OLEH PARA PIHAK (Perkara Perdata)

Tabel 28 Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023

SISA 2022	MASUK 2023	PUTUS 2023	SISA 2023
5	40	40	5

Tabel 29 Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2023

URAIAN	SALDO AWAL (Des 22)	PENERIMAAN 2023	PENGELUARAN 2023	SALDO AKHIR 2023 (Saldo Awal + Penerimaan - Pengeluaran)
Biaya Perkara	Rp. 750.000	Rp. 150.000 x 40 berkas = Rp. 6.000.000	Rp. 150.000 x 40 berkas = Rp. 6.000.000	Rp. 750.000

Adapun rincian biaya perkara sebesar Rp.150.000,- adalah sebagai berikut :

Biaya Pemberkasan	:	Rp.130.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Total	:	Rp.150.000,-

Gambar 3 Rician Biaya Perkara di SIPP



SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Selamat Datang **Endang Wijaya** ✖ Keluar
Anda Login Sebagai **Mega I. Pidana**

[Edit Profile](#)

[Home](#) [Perdata Banding](#) [Banding Pidana](#) [Pidana Anak](#) [Tipikor](#) [SPPT](#) [Jadwal Sidang](#) [Referensi](#) [Pesan](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA BANDING

[Kembali](#)

Nama Pengadilan TK I / Nomor Perkara	Tanggal Putusan TK I / Jenis Perkara	Nomor Perkara Tingkat Banding	Majelis Hakim / Panitia Pengganti	Status Perkara Lama Proses Perkara
Nama Pengadilan : PENGADILAN NEGERI KEPAHANG Nomor Pekara : 2/Pdt.G/2022/PN Kph	Tanggal Putusan: Kamis, 17 Nov. 2022 Jenis Perkara : Objek Sengketa Tanah	eCourt 1/PDT/2023/PT BGL	Majelis Hakim : Hakim Ketua : Dr. PONTAS EFENDI, SH., MH. Hakim Anggota : Hj. NINIK ANGGRAINI, S.H. Hakim Anggota : ROSMINA, SH, MH Panitia Pengganti: Supran, SH	Status Terakhir : Minutasi Lama Proses : 55 Hari

Berkas
Data Umum
Penetapan
Court Calendar
Jadwal Sidang
Pertimbangan Hukum
Putusan Akhir
Tanda Tangan Elektronik
Biaya Perkara
Riwayat Perkara

Biaya Tingkat Banding

No	Tanggal Transaksi	Uraian	Jumlah			Keterangan
			Pemasukan	Pengeluaran	Sisa	
1	Selasa, 03 Jan. 2023	Biaya Perkara	Rp. 150.000		Rp. 150.000	
2	Senin, 27 Feb. 2023	Materai		Rp. 10.000	Rp. 140.000	
3	Senin, 27 Feb. 2023	Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 130.000	
4	Senin, 27 Feb. 2023	Biaya Pemberkasan		Rp. 130.000	Rp. 0	
Total			Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 0	

Tabel 30 Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2023 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp.	%
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	<u>Program</u> : Dukungan Manajemen <u>Kegiatan</u> : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	21.471.775.000	a. Belanja Non Operasional b. Belanja Gaji dan Tunjangan c. Belanja Operasional	21.054.738.000	21.449.824.073	99,90
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu							
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu							
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi							
		e. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	<u>Program</u> : Dukungan Manajemen <u>Kegiatan</u> : Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingkungan MA	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	417.073.000	a. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	417.073.000	416.470.050	99,86
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<u>Program</u> : Penegakan dan Pelayanan Hukum <u>Kegiatan</u> : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	174.500.000	Belanja Barang	171.619.760	2.880.240	98,35
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu							
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu							



BAB IV PENUTUP

ZONA
INTEGRITAS



MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2023 menyajikan 2 (dua) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 5 indikator pada Sasaran I Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 3 indikator pada Sasaran II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan "Berhasil" karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 100,80%. Dari 8 indikator kinerja yang diperjanjikan, seluruhnya dinyatakan berhasil karena dapat mencapai target, bahkan ada 2 indikator kinerja yang melampaui target yang diperjanjikan.

Capaian sasaran tahun 2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peningkatan fungsi pengawasan bidang dan asesmen internal secara rutin dan berkala
2. Adanya berbagai kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti kegiatan Bimtek, Diklat, Sosialisasi dan Pembinaan
4. Berbagai Inovasi yang diciptakan dan terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi oleh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu
5. Adanya ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.

Hasil Capaian Kinerja pada LKjIP 2023 selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

B. REKOMENDASI

Walaupun pada tahun 2023 ini seluruh target dapat tercapai namun tetap harus dipersiapkan dalam menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang bisa menyebabkan tidak tercapainya sasaran di masa yang akan datang. Ini sebagai bentuk upaya preventif Pengadilan Tinggi Bengkulu agar tetap bisa mempertahankan capaian kinerja yang baik dan maksimal tersebut di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu direkomendasikan untuk terus melakukan :

1. Penguatan Organisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Penguatan Pengawasan internal maupun eksternal serta monitoring evaluasi secara berkala dari Pimpinan Pengadilan
3. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat dan civil society sebagai bagian integral dari pengadilan
4. Penguatan Produktifitas dan Administrasi penyelesaian perkara
5. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
6. Peningkatan Sarana Prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

PENGADILAN TINGGI BENGKULU “CERDAS”
CERMAT - ENYAHKAN KKN - RESPONSIF - DISIPLIN - ADIL - SEJAHTERA